

**PENINGKATAN KAPASITAS PENGRAJIN MEBEL & KERAJINAN DI
JOMBANG DALAM IMPLEMENTASI & PEMENUHAN PERSYARATAN
UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT SVLK**

PROGRAM KERJASAMA ASMINDO DENGAN FAO FLEGT PROGRAM

R.M SYANG DHIVA, JOMBANG 18 - 19 DECEMBER 2018



Foto: Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang (Imam Sutrisno SH, MM) bersama jajaran dan Dewan Pengurus Pusat Asmindo pada acara peningkatan kapasitas pengrajin mebel dan kerajinan di wilayah Jombang dalam implemetasi SVLK

Pelatihan SVLK dalam rangka peningkatan kapasitas UKM mebel dan kerajinan di wilayah Jombang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Desember 2018, di rumah makan Syang Dhiva Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang, Imam Sutrisno SH, MM. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Dewan Pengurus Pusat Asmindo, yaitu (1) Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga, M. David R. Wijaya; (2) Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang Kajian Regulasi, Sertifikasi dan Advokasi, Robert Wijaya; (3) Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang Bahan Baku dan Penunjang, yang juga menjabat sebagai Ketua Asmindo Komda Jawa Timur, Liem Laurentius; serta (4) Ketua Bidang Organisasi Asmindo, Endro Wardoyo. Selain itu sebagai narasumber adalah (1) Koordinator P3HH Pos

Jombang, UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Ismai S.P.; (2) Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang, Joko Muji Subagyo S.sos, M.si; serta (3) Direktur Eksekutif Asmindo, Indrawan; dan sebagai moderator adalah Ketua Bidang Organisasi Asmindo, Endro Wardoyo. Acara diikuti oleh 38 peserta, yang terdiri atas pengrajin mebel dan kerajinan di wilayah Jombang, perwakilan Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Jombang.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang, Imam Sutrisno SH, MM., menyampaikan sangat mendukung upaya-upaya dalam peningkatan kapasitas UKM, khususnya bagi para pengrajin mebel dan kerajinan di wilayah Jombang. Disampaikan juga bahwa diharapkan acara ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan para pengrajin dalam turut berpartisipasi dalam perdagangan kayu legal. Dipahami bahwa tuntutan pasar internasional terhadap produk – produk ramah lingkungan terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk produk mebel dan kerajinan kayu. Oleh karena itu, untuk dapat memasuki pasar internasional maka para pengrajin mebel dan kerajinan kayu di wilayah Jombang harus mampu memenuhi tuntutan pasar internasional, khususnya terkait dengan penggunaan bahan baku kayu, yang jelas asal usul dan legalitasnya. Untuk itu, adanya program kerjasama Asmindo dan FAO dalam pendampingan SVLK di wilayah Jombang merupakan kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengrajin. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Asmindo dan FAO, yang telah memilih Kabupaten Jombang sebagai salah satu target wilayah dari program ini.

Selanjutnya Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga, M. David R. Wijaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa Asmindo telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja ekspor mebel dan kerajinan nasional, sebagai bentuk kontribusi industri ini terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, Asmindo akan terus mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional. Disadari bahwa upaya-upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri, oleh karenanya Asmindo senantiasa membuka diri untuk melakukan kolaborasi positif dengan berbagai lembaga, baik lembaga daerah, nasional, regional maupun internasional. Salah satunya adalah kerjasama Asmindo dengan FAO dalam peningkatan kapasitas UKM, yaitu melalui program pendampingan SVLK bagi UKM mebel dan kerajinan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang Bahan Baku dan Penunjang, yang juga merupakan Ketua Asmindo Komda Jawa Timur, Liem Laurentius, menyampaikan bahwa saat ini mayoritas anggota Asmindo Komda Jawa Timur merupakan eksportir mebel, baik berbahan baku kayu, rotan maupun kombinasi keduanya. Disampaikan bahwa peluang pasar produk mebel kayu dan rotan masih

terbuka lebar, baik dipasar domestik maupun ekspor. Asmindo Komda Jawa Timur membuka peluang bagi pengrajin-pengrajin di wilayah Jombang yang berminat untuk bekerjasama dengan para eksportir di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya guna meningkatkan penjualan mereka. Oleh karena itu, agar produknya dapat diterima pasar, maka para pengrajin harus dapat menjaga kualitas produk, serta memahami desain-desain mebel yang sesuai dengan permintaan pasar. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian, adalah terkait kuantitas, kontinuitas serta ketepatan waktu dalam pemenuhan order yang telah disepakati. Hal-hal tersebut merupakan point-point penting yang harus diperhatikan oleh para pengrajin guna mempertahankan kelangsungan usaha mereka.



Foto: Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang, Imam Sutrisno SH, MM (tengah) bersama Wakil Ketua Asmindo Umum Bidang Organisasi, M. David R. Wijaya (kiri) dan Ketua Asmindo Komda Jawa Timur, Liem Laurentius (kanan), pada acara peningkatan kapasitas pengrajin mebel dan kerajinan di wilayah Jombang dalam implemetasi SVLK

Acara selanjutnya adalah pemaparan dari tiga nara sumber yang dipandu oleh moderator. Sebagai nara sumber pertama adalah Direktur Eksekutif Asmindo, Indrawan, yang memaparkan tentang program kerjasama Asmindo dan FAO. Disampaikan bahwa program kerjasama Asmindo dan FAO bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi UKM mebel dan kerajinan dalam perdagangan kayu legal. Program ini merupakan bagian dari FAO-EU FLEGT Programme, yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan di 3 wilayah, yaitu:

Klaten, Jombang dan Bali. Kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini meliputi fasilitasi pendampingan sampai mendapatkan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara berkelompok, serta partisipasi dalam kegiatan pameran mebel dan kerajinan bertaraf internasional.

Narasumber kedua adalah Koordinator P3HH Pos Jombang, UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Ismai S.P. Dalam paparannya menyampaikan bahwa dasar hukum implementasi SVLK adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30 /Menlhk /Setjen /PHPL.3/3 /2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak, serta peraturan teknis turunannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8 /2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. Selain itu disampaikan pula bahwa banyak manfaat yang akan dirasakan oleh pengrajin dengan mengikuti SVLK, diantaranya adalah (1) Tertatannya administrasi dalam usahanya; (2) Terbangunya usaha industri kehutanan yang proposional; (3) Terbangun jaringan usaha bagi pelaku usaha per kayu di Jombang; dan (4) Terpenuhinya legalitas usaha bagi pelaku usaha di Jombang.

Narasumber ketiga adalah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang, Joko Muji Subagyo S.sos, M.si., yang menyampaikan paparan berjudul Konsep Pelayanan Publik dan Dinamika Pelayanan, yang dilanjutkan dengan paparan terkait pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS). Disampaikan bahwa definisi pelayanan publik menurut UU No. 25 tahun 2009, adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, disampaikan pula dasar hukum pendirian DPMPTSP Kabupaten Jombang, yaitu Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Adapun izin yang ditangani DPM PTSP berdasar Peraturan Bupati Jombang No. 16/2018 (sebelum pemberlakuan OSS), adalah: (1) *Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*; (2) *Tanda Daftar Perusahaan (TDP)*; (3) *Tanda Daftar Gudang (TDG)*; (4) *Izin Usaha Industri (IUI)*; (5) *Izin Usaha Penggilingan Padi /Huller*; (6) *Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)*; (7) *Izin Usaha Toko Modern (IUTM)*; (8) *Izin Pemanfaatan Ruang*; (9) *Izin Lokasi*; (10) *Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*; (11) *Izin Budidaya Pertanian / Pertenakan, Izin Usaha Peternakan (IUP), Rumah Potong Hewan (RPH)*; (12) *Izin Lingkungan*; (13) *Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)*. Namun dalam rangka reformasi birokrasi, guna memberikan kemudahan dalam proses perizinan, baru-baru ini pemerintah Indonesia

mengeluarkan kebijakan *online single submission (OSS)*. Perizinan pokok dalam *online single submission* dibagi dalam 4 kategori, yaitu:

1. Pendaftaran dan Perizinan Dasar, meliputi kegiatan pendaftaran investasi/berusaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan dasar yang berupa tanda pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan dan kesehatan; serta pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja asing. NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan.
2. Perizinan Lingkungan dan Standar Bangunan, yaitu izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan lingkungan hidup; dan kesesuaian dengan standar bangunan yang ditentukan serta kelayakan fungsi bangunan (Sertifikat Layak Fungsi/SLF).
3. Perizinan Usaha, yaitu perizinan yang menyangkut kegiatan usaha utama (dalam rangka memproduksi), seperti: Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Perdagangan (IUP), Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Jasa Pariwisata, dll.
4. Perizinan Komersial, yaitu perizinan yang diperlukan dalam rangka memasarkan, mendistribusikan, mengekspor barang/jasa yang dihasilkan, dan/atau mengimpor bahan baku/komponen/barang jadi.



Foto: Peserta peningkatan kapasitas pengrajin mebel dan kerajinan di wialyah Jombang dalam implemetasi SVLK

Pelatihan hari kedua dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang Kajian Regulasi, Sertifikasi dan Advikasi, Robert R. Wijaya dan Direktur Eksekutif Asmindo, sekaligus sebagai *Project Manager* program kerjasama Asmindo dengan FAO, Indrawan. Pada hari kedua pelatihan, disampaikan mengenai prinsip, kriteria, indikator dan verifier SVLK untuk jenis ijin khususnya untuk jenis usaha yang termasuk dalam kategori pemegang Tanda Daftar Industri (TDI), yaitu ijin usaha dengan nilai investasi dibawah Rp. 200 juta (diluar tanah dan bangunan) dan Industri Rumah Tangga (IRT)/ pengrajin. Dimana kategori usaha ini yang paling sesuai untuk para pengrajin mebel dan kerajinan kayu di wilayah Jombang. Selanjutnya, dibentuk kelompok UKM Jombang, yang akan mengikuti pendampingan SVLK secara berkelompok, dengan nama Kelompok Mekar Jaya. Susunan pengurus dan anggota Kelompok SVLK Mekar Jaya, adalah sebagai berikut:

Ketua : Arif Muttaqin, dari UD Murah Jaya, nomor Hp. 082232324364
Sekretaris : Sukaji, dari UD Kadung Jaya, nomor Hp. 082257335896
Bendahara : Hermawan, dari UD Lati Production, nomor Hp. 081357120700
Anggota : 1) Rahmat Hidayat, dari UD Lutfi Production, Hp. 081250279194
2) Solifudin, UD. Mukarti, Hp. 085730200704
3) Misbachuddin, UD Sumber Makmur, Hp. 081 33 11 22 254
4) Jumardi, UD Jati Makmur, Hp. 085 736 985 992
5) Agus salim & Isa Ansori, UD. Langgeng Jaya, 081335731243 (Isa); 085604115153
6) Abdul Rasyid, UD Mitra 0857 0861 8181

Jombang, 19 Desember 2018

ASOSIASI INDUSTRI PERMEBELAN &
KERAJINAN INDONESIA (ASMINDO)

Notulen